BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah penting dalam pembangunan ekonomi karena berkaitan dengan keterbatasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan (BPS) 2016. Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan kerja, dan distribusi pendapatan yang tidak merata (World Bank) 2026. Menurut Todaro dan Smith (2021), kemiskinan merupakan kondisi multidimensional yang mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Sejalan dengan itu, Bank Dunia (2020) menjelaskan bahwa keterbatasan kesempatan ekonomi dapat menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi selama periode 2019–2024, yaitu sebesar 8,33% pada tahun 2019, meningkat menjadi 8,75% pada tahun 2020 dan 9,01% pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 8,42% pada tahun 2022, 8,15% pada tahun 2023, dan 7,99% pada tahun 2024. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi kemiskinan setelah pandemi, meskipun upaya pengentasan kemiskinan tetap diperlukan.

Kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial ekonomi, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), ketimpangan pendapatan, dan inflasi. IPM mencerminkan kualitas pembangunan manusia melalui aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Peningkatan IPM diharapkan mampu mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kemampuan dan produktivitas masyarakat, meskipun pengaruhnya tidak selalu terjadi secara langsung karena adanya faktor lain (UNDP, 2019).

Selain IPM, TPT juga berkaitan dengan kondisi kemiskinan. Tingginya pengangguran dapat mengurangi pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga menyulitkan pemenuhan kebutuhan dasar International Labour Organization (2022). Selanjutnya, ketimpangan pendapatan dapat menghambat pengentasan kemiskinan apabila manfaat pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Todaro dan Smith, 2021). Sementara itu, inflasi dapat menurunkan daya beli, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah, karena kenaikan harga barang dan jasa meningkatkan beban pemenuhan kebutuhan pokok (Mankiw, 2018).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara faktor-faktor ekonomi tersebut dan kemiskinan dapat berbeda menurut wilayah, periode, serta variabel yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh IPM, TPT, ketimpangan pendapatan, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keterkaitan faktor-faktor tersebut dengan kondisi kemiskinan di Sumatera Utara pada periode penelitian. Tren kemiskinan

di Sumatera Utara tahun 2020-2025 dapat di analisis dengan mengamati perubahan pada indikator-indikator sosial ekonomi yang menentukan kondisi kelompok penduduk paling rentan di wilayah tersebut. Berikut perkembangan kemiskinan di sumatera utara dalam periode 2020-2025.

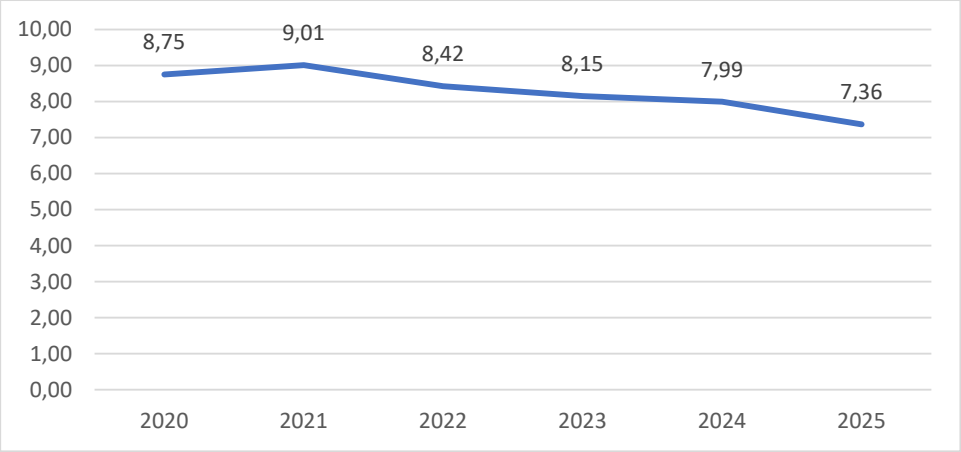

Gambar 1. 1 Perkembangan Kemiskinan Di Sumatera utara 2020-2025 (%)

Sumber: Data BPS Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan Gambar 1.1, tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, kemiskinan sebesar 8,75% dan meningkat menjadi 9,01% pada tahun 2021 akibat dampak pandemi COVID-19 yang memperlambat aktivitas ekonomi dan menurunkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, kemiskinan menurun menjadi 8,42% pada tahun 2022, 8,15% pada 2023, 7,99% pada 2024, dan 7,36% pada 2025. Penurunan ini didukung oleh pemulihan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, serta bantuan sosial dan program pemulihan ekonomi. Meskipun demikian, kemiskinan masih rentan terhadap guncangan ekonomi sehingga diperlukan upaya pengentasan berkelanjutan.

Menurut Hapsari dan Nurhayati (2025), peningkatan IPM melalui perbaikan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan dapat menurunkan kemiskinan dengan meningkatkan produktivitas dan peluang ekonomi. Namun, Ravallion dan Chen (2003) menunjukkan bahwa peningkatan IPM tidak selalu diikuti penurunan kemiskinan secara signifikan. Gaol et al. (2024) juga menemukan bahwa peningkatan IPM di Sumatera Utara berkaitan dengan penurunan kemiskinan melalui perbaikan angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah yang mendorong produktivitas tenaga kerja. Data BPS menunjukkan bahwa peningkatan IPM pada 2015–2024 diikuti penurunan kemiskinan. Namun, ketidakmerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan air bersih masih menjadi hambatan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, IPM penting diperhatikan sebagai indikator pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat.

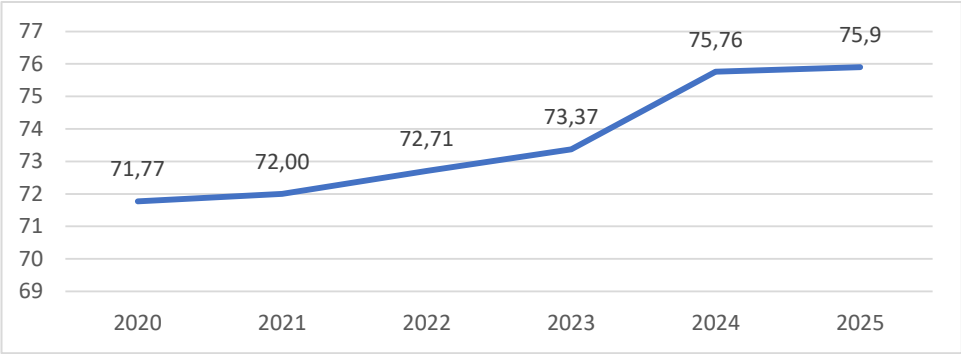

Gambar 1. 2 Perkembangan IPM di Sumatera Utara 2020-2025 (Point)

Sumber: Data BPS Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan Gambar 1.2, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2025 menunjukkan tren peningkatan, dari

71,77 pada tahun 2020 menjadi 72,00 pada tahun 2021, 72,71 pada tahun 2022, 73,37 pada tahun 2023, 75,76 pada tahun 2024, dan 75,90 pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kualitas pembangunan manusia dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Peningkatan IPM melalui perbaikan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan dapat meningkatkan produktivitas, memperluas peluang ekonomi, serta mengurangi kerentanan masyarakat sehingga berpotensi menurunkan kemiskinan (Hapsari & Nurhayati, 2025). Namun, peningkatan IPM tidak selalu diikuti penurunan kemiskinan yang signifikan (Ravallion & Chen, 2003). Hal ini sejalan dengan perbedaan hasil penelitian Hapsari dan Nurhayati (2025), yang menemukan pengaruh negatif dan signifikan, dengan Apriyanti dan Rospida (2025), yang menemukan bahwa IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya *research gap* sehingga pengaruh IPM terhadap kemiskinan di Sumatera Utara perlu diteliti lebih lanjut.

Selain IPM, pengangguran juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi kemiskinan. Pengangguran terbuka merupakan kondisi ketika angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau telah memperoleh pekerjaan namun belum mulai bekerja (Aginta et al., 2025). BPS mencatat TPT Sumatera Utara sebesar 5,60% pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja masih menjadi tantangan. Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan (Damanik & Suharianto, 2025).

Pengangguran berkaitan erat dengan kemiskinan karena kehilangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya pendapatan dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan (Chisale, 2023; Zaman et al., 2023). Semakin tinggi pengangguran, semakin besar risiko masyarakat mengalami kemiskinan. Sebaliknya, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan partisipasi kerja dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga serta kemampuan memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Adapun perkembangan TPT di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2015–2024 disajikan sebagai berikut.

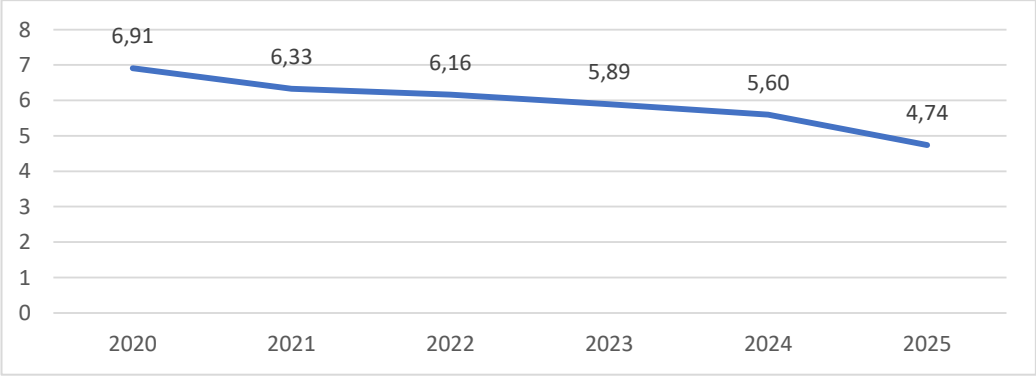

Gambar 1. 3 Perkembangan TPT di Sumatera Utara 2020-2025 (%)

Sumber: Data BPS Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan Gambar 1.3, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2025 menunjukkan tren penurunan, dari 6,91% pada tahun 2020 menjadi 6,33% pada 2021, 6,16% pada 2022, 5,89% pada 2023, 5,60% pada 2024, hingga 4,74% pada 2025. Penurunan ini mengindikasikan perbaikan pasar tenaga kerja yang didukung pemulihan ekonomi, peningkatan aktivitas usaha, dan penyerapan tenaga kerja

pascapandemi. Namun, pengaruhnya terhadap kemiskinan masih perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian terdahulu menunjukkan perbedaan hasil mengenai pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan. Nasution et al. (2023) menunjukkan hasil berbeda dengan Manalu et al. (2025), yang menemukan bahwa pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Perbedaan tersebut menjadi *research gap* yang mendasari perlunya penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh TPT terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. Selain pengangguran, ketimpangan pendapatan juga dapat memengaruhi kemiskinan karena distribusi pendapatan yang tidak merata meningkatkan kerentanan ekonomi dan membatasi akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap kebutuhan dasar. Menurut Firdaus (2023), pembangunan ekonomi tidak hanya dinilai dari tingkat pendapatan, tetapi juga pemerataannya. Fosu (2010) menjelaskan bahwa pendapatan yang terkonsentrasi pada kelompok tertentu dapat membatasi akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi sehingga meningkatkan risiko kemiskinan.

Berdasarkan data BPS Sumatera Utara (2025), Gini Ratio menurun dari 0,317 pada tahun 2019 menjadi 0,297 pada tahun 2024. Nilai tersebut berada di bawah 0,4 dan menunjukkan perbaikan pemerataan pendapatan, meskipun belum menjamin kesejahteraan yang merata. Menurut Mankiw (2019), tingginya Gini Ratio mencerminkan ketimpangan distribusi pendapatan yang dapat membatasi akses kelompok berpendapatan rendah terhadap sumber daya ekonomi. Kondisi ini dapat menghambat pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan (Aking &

Padmono, 2025). Sebaliknya, penurunan ketimpangan memungkinkan distribusi sumber daya lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (UNDP, 2024). Dengan demikian, ketimpangan pendapatan yang tinggi berpotensi meningkatkan kemiskinan, sedangkan penurunannya dapat mendukung pengentasan kemiskinan. Adapun perkembangan kesenjangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2025 disajikan sebagai berikut.

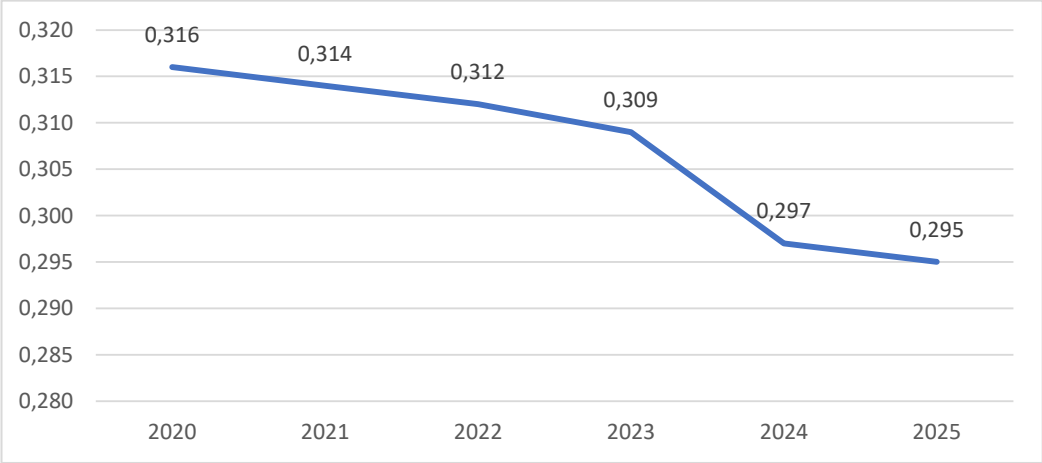

Gambar 1. 4 Perkembangan Kesenjangan Pendapatan di Sumatera Utara 2020-2025 (Point)

Sumber: Data BPS Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan Gambar 1.4, kesenjangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2025 menunjukkan tren penurunan, dari Rasio Gini sebesar 0,316 pada tahun 2020 menjadi 0,314 pada 2021, 0,312 pada 2022, 0,309 pada 2023, 0,297 pada 2024, dan 0,295 pada 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan pemerataan distribusi pendapatan sehingga manfaat pembangunan ekonomi berpotensi dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Pada periode 2020–2021, Rasio Gini menurun dari 0,316 menjadi 0,314. Meskipun

relatif kecil, penurunan tersebut mencerminkan perbaikan pemerataan pendapatan. Ketimpangan dapat membatasi akses kelompok berpendapatan rendah terhadap manfaat pertumbuhan ekonomi, sedangkan dampaknya terhadap kemiskinan juga dipengaruhi kebijakan pemerintah, seperti bantuan sosial dan redistribusi pendapatan. Perbedaan hasil penelitian terdahulu menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai pengaruh kesenjangan pendapatan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara.

Selain itu, inflasi dapat memengaruhi kemiskinan melalui kenaikan harga barang dan jasa yang menurunkan daya beli, terutama masyarakat berpendapatan rendah. Kenaikan harga kebutuhan pokok dapat menyulitkan pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan risiko kemiskinan. Sebaliknya, inflasi yang terkendali dapat menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi serta mendukung pengentasan kemiskinan (Agustin et al., 2025). Meskipun Rasio Gini menurun dari 0,316 pada tahun 2020 menjadi 0,295 pada tahun 2025, kondisi tersebut belum menjamin pemerataan kesejahteraan karena masyarakat berpendapatan rendah masih dapat menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Oleh karena itu, pengaruh kesenjangan pendapatan terhadap kemiskinan perlu dianalisis lebih lanjut. Adapun perkembangan inflasi di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2025 disajikan pada Gambar 1.5.

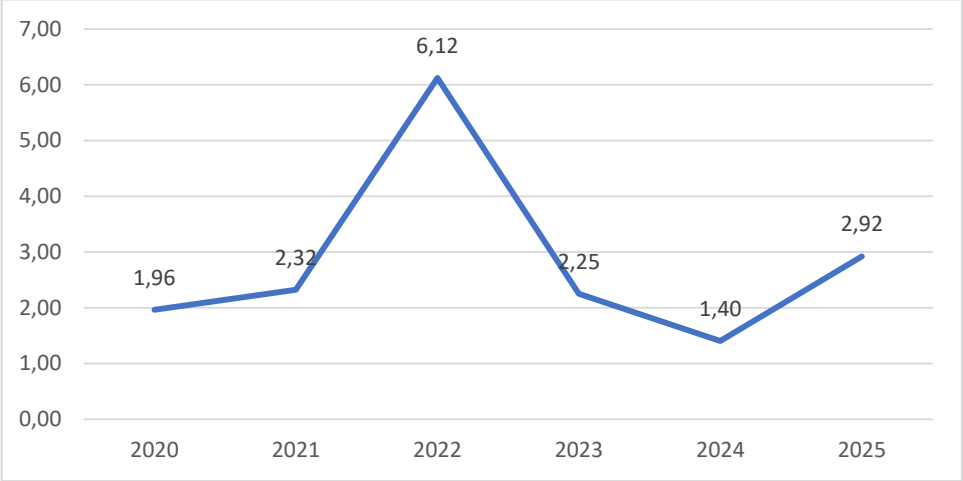

Gambar 1. 5 Perkembangan Inflasi di Sumatera Utara 2020-2025 (%)

Sumber: Data BPS Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan Gambar 1.5, inflasi di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2025 mengalami fluktuasi. Inflasi meningkat dari 1,96% pada tahun 2020 menjadi 2,32% pada 2021, mencapai puncak 6,12% pada 2022, kemudian menurun menjadi 2,25% pada 2023 dan 1,40% pada 2024, sebelum kembali naik menjadi 2,92% pada 2025. Kondisi ini menunjukkan perubahan tekanan harga, terutama pada tahun 2022. Pada 2020–2021, inflasi meningkat dari 1,96% menjadi 2,32%, seiring dengan kenaikan kemiskinan dari 8,75% menjadi 9,01%. Fenomena ini menunjukkan hubungan searah antara kedua variabel. Secara teoretis, inflasi dapat menurunkan daya beli, terutama masyarakat berpendapatan rendah, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan. Namun, kemiskinan juga dipengaruhi faktor lain, seperti ketenagakerjaan, pendapatan, dan kebijakan pemerintah. Fluktuasi harga juga mencerminkan kerentanan stabilitas ekonomi yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Siregar sebagaimana dikutip dalam Siagian et al. (2025) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.

Namun, hasil penelitian terdahulu belum konsisten. Siagian et al. (2025) menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan Amelia et al. (2020) menemukan bahwa pengaruhnya tidak signifikan ketika stabilitas harga pangan dan perlindungan sosial terjaga. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam kondisi ekonomi pascapandemi di Sumatera Utara. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis simultan empat variabel, yaitu IPM, TPT, kesenjangan pendapatan, dan inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan data terbaru yang mencakup periode pascapandemi COVID-19. Penelitian terdahulu umumnya hanya mengkaji satu atau dua variabel, serta menggunakan wilayah dan periode pengamatan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh keempat variabel independen terhadap kemiskinan sebagai variabel dependen. Periode pengamatan dipilih untuk menggambarkan perkembangan kemiskinan sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19. Hasil penelitian diharapkan memberikan bukti empiris serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Sumatera Utara.

Berdasarkan penelitian terdahulu, *research gap* penelitian ini terletak pada ketidakkonsistenan hasil mengenai pengaruh IPM, TPT, kesenjangan pendapatan, dan inflasi terhadap kemiskinan, baik dari segi signifikansi maupun arah

hubungan. Selain itu, terdapat kesenjangan kontekstual karena sebagian penelitian dilakukan pada tingkat nasional atau wilayah lain dengan periode sebelum maupun selama pandemi. Padahal, pemulihan ekonomi dan guncangan global pascapandemi dapat memengaruhi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus mengkaji kondisi Provinsi Sumatera Utara dengan data yang mencakup perkembangan ekonomi terkini.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh IPM, TPT, kesenjangan pendapatan, dan inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Hasilnya diharapkan memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di wilayah tersebut. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis mengangkat judul "**Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Kesenjangan Pendapatan dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara"**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan masalah penelitian dari penjelasan penelitian diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?

3. Bagaimana pengaruh kesenjangan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?
4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?
5. Bagaimana pengaruh IPM, tingkat pengangguran, kesenjangan pendapatan, dan inflasi secara simultan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Beberapa hal yang dipaparkan pada rumusan masalah diatas, maka menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Sumatera Utara.
2. pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Sumatera Utara.
3. pengaruh kesenjangan pendapatan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara.
4. pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Sumatera Utara.
5. pengaruh IPM, tingkat pengangguran, kesenjangan pendapatan, dan inflasi secara simultan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Mengingat konteks penelitian ini, rumusan masalah yang tepat untuk ditangani, serta tujuan yang jelas untuk dicapai, studi ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang signifikan dan nyata:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian ekonomi pembangunan terkait faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan, yaitu IPM, tingkat pengangguran, kesenjangan pendapatan, dan inflasi.
2. Bagi penelitian-penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmiah guna memperkaya literatur mengenai dinamika kemiskinan di tingkat regional, serta menjadi dasar untuk pengembangan model penelitian yang lebih komprehensif mengenai isu kemiskinan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pembangunan manusia, pengendalian pengangguran, pengurangan kesenjangan pendapatan, serta pengelolaan inflasi.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Sumatera Utara, sehingga dapat meningkatkan pemahaman publik mengenai kondisi ekonomi daerah dan peran berbagai variabel makro dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.